



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 100.3.3/913/ 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
- b. bahwa sebagai instrumen perencanaan penetapan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Bangli agar penetapannya terarah dan sistematis perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025.**
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibahas dalam rapat bersama Tim Propempera Kabupaten Bangli.

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Pertanggungjawaban penggunaan dana/biaya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BANGLI,



SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali
Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bangli.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bangli.
4. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
6. Anggota Tim dan Kelompok Ahli.

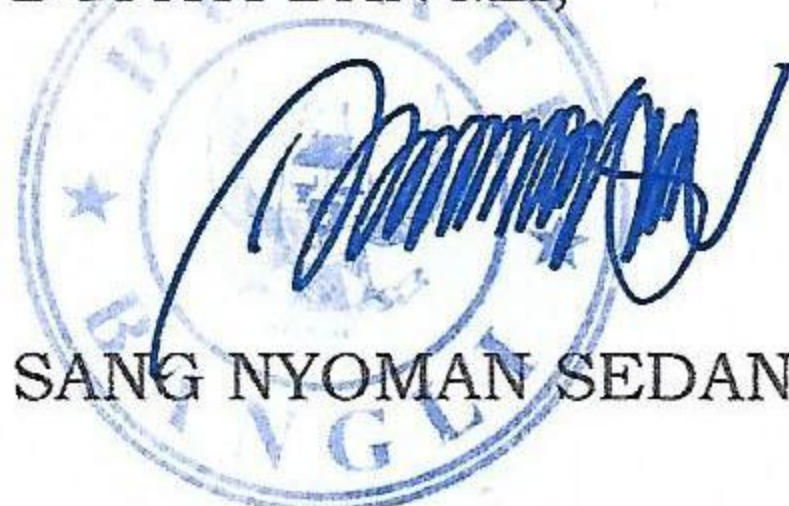
LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 100.3.3/913 /2024
 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN
 PERATURAN KEPALA DAERAH
 TAHUN 2025

	Jenis	Tentang	Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Peraturan Bupati	Indikator Kerja Utama (IKU)	BAPPEDA	Baru
2.	Peraturan Bupati	Rencana Strategis Tahun 2025-2029	BAPPEDA	Baru
3.	Peraturan Bupati	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026	BAPPEDA	Baru
4.	Peraturan Bupati	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025	BAPPEDA	Baru
5.	Peraturan Bupati	Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026	BAPPEDA	Baru
6.	Peraturan Bupati	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025	BAPPEDA	Baru
7.	Peraturan Bupati	Kanjian Risiko Bencana Tahun 2025-2029	BPBD dan DAMKAR	Baru
8.	Peraturan Bupati	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PPKB	Baru
9.	Peraturan Bupati	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PPKB	Baru
10.	Peraturan Bupati	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PPKB	Baru
11.	Peraturan Bupati	Standar Belanja Kegiatan Di Lingkungan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PPKB	Baru
12.	Peraturan Bupati	Pengalokasian Alokasi Dana Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PPKB	Baru
13.	Peraturan Bupati	Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Baru

	Jenis	Tentang	Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5
			PPKB	
14.	Peraturan Bupati	Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah Untuk Perbekel, Perangkat Desa Dan Honorarium Staf Perangkat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PPKB	Baru
15.	Peraturan Bupati	Tata Cara Pemberian Hak Badan Permusyawaratan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PPKB	Baru
16.	Peraturan Bupati	Tata Kearsipan	Bagian Umum	Baru
17.	Peraturan Bupati	RDTR Kawasan Perkotaan Bangli	Dinas PUPRPERKIM	Baru
18.	Peraturan Bupati	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	BKPAD	Baru
19.	Peraturan Bupati	Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026	BKPAD	Baru
20.	Peraturan Bupati	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKPAD	Baru
21.	Peraturan Bupati	Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	BKPAD	Baru
22.	Peraturan Bupati	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	BKPAD	Baru
23.	Peraturan Bupati	Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	BKPAD	Baru
24.	Peraturan Bupati	Pengelolaan Air Tanah	BKPAD	Baru
25.	Peraturan Bupati	Harga Dasar Air Pengenaan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, Perizinan, Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Penerbitan, Pembayaran, Angsuran, Penundaan, Pengurangan, Kelebihan Pembayaran Pajak	BKPAD	Baru

	Jenis	Tentang	Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5
26.	Peraturan Bupati	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kabupaten Layak Anak	Dinsos, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Baru
27.	Peraturan Bupati	Serifikat Laik Fungsi Bangunan	DPUPRPERKIM	Baru
28.	Peraturan Bupati	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal	DPMPTSP	Baru
29.	Peraturan Bupati	Rencana Umum Penanaman Modal	DPMPTSP	Baru
30.	Peraturan Bupati	Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat	Bagian Organisasi	Baru
31.	Peraturan Bupati	Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah	Bagian Organisasi	Baru
32.	Peraturan Bupati	Tata Cara Pergeseran Anggaran	BKPAD	Baru
33.	Peraturan Bupati	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas	BKPAD	Baru
34.	Peraturan Bupati	<i>Inovasi</i> Daerah	BRIDA	Baru
35.	Peraturan Bupati	Perubahan Atas Peraturan Bupati 25 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Baru
36.	Peraturan Bupati	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap	BKPAD	Baru
37.	Peraturan Bupati	Ketentuan Batas Usia Bagi Pegawai Tidak Tetap Pada Pemerintah Daerah	BKDSDM	Baru

BUPATI BANGLI,



SANG NYOMAN SEDANA ARTA